

# BARAKKA

## JURNAL BANGUNAN KONSTRUKSI

ISSN(e) : 3031-5646 / ISSN(p) : 3031-5654

# Evaluasi Penanganan Banjir pada Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Mappedeceng Desa Kapidi Taratallu

Suci Fatmawati<sup>1</sup>, Musdalifah.s<sup>2</sup>, Zainal Arifin Halim<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Makassar, <sup>2</sup>Universitas Islam Makassar, <sup>3</sup>Universitas Islam Makassar  
[sucifatmawati.dty@uim-makassar.ac.id](mailto:sucifatmawati.dty@uim-makassar.ac.id), [musdalifah.s.dty@uim-makassar.ac.id](mailto:musdalifah.s.dty@uim-makassar.ac.id),  
[zainalarifinhalim.dty@uim-makassar.ac.id](mailto:zainalarifinhalim.dty@uim-makassar.ac.id)

### Abstrak

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Banjir adalah suatu keadaan dimana suatu daerah tergenang air dalam jumlah besar. Banjir dapat terjadi karena dua faktor yaitu antropogenik dan faktor alam. Banjir di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara merupakan bencana banjir yang terjadi akibat hujan deras dengan intensitas tinggi dan jebolnya tanggul yang terkait dengan pembangunan saluran irigasi yang belum selesai dan tidak berfungsi. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan penanganan banjir di Desa Kapidi, Mappedeceng, seiring dengan diterapkannya kebijakan seperti tahap tanggap darurat. Analisis data pada penelitian ini meliputi pengkajian dan implementasi pengelolaan banjir di desa Kapidi. Evaluasi meliputi efektivitas, efisiensi, kesesuaian, keadilan, konsistensi, dan daya tanggap. Implementasinya meliputi komunikasi, sumber daya, penjadwalan, dan birokrasi. Rekomendasi peneliti mengenai cara penanganan banjir di Desa Kapidi, Distrik Mappedeceng, Prefektur Beilugwu antara lain perlunya komunikasi yang baik antara pemerintah desa yaitu pemerintah pusat, dan fasilitas yang memadai untuk menangani banjir dan kemungkinan akan terjadi.

**Kata kunci: Banjir, Tanggul, Curah Hujan**

### Abstract

Flooding is one of the most common natural disasters in Indonesia. Flood is a condition where an area is inundated with large amounts of water. Floods can occur due to two factors: natural and anthropogenic. Flooding in Kapidi Village, Mappedeceng Sub-district, North Lugori District flood disaster that occurs due to heavy rainfall with high intensity and levee collapse related to the construction of unfinished and non-functional irrigation channels.

Response. It is necessary to evaluate flood management policies in Kapidi Village, Mappedeceng District, Beilugwu Prefecture, along with the implementation of policies such as the emergency response stage. Data analysis in this study includes the assessment and implementation of flood management in Kapidi village. Evaluation includes effectiveness, efficiency, suitability, fairness, consistency, and responsiveness. The implementation includes communication, resources, scheduling, and bureaucracy. The researcher's recommendations regarding how to handle floods in Kapidi Village, Mappedeceng District, Beilugwu Prefecture include the need for good communication between the village government, namely the central government, and adequate facilities to handle floods and the possibilities that will occur.

**Keywords: flood, embankment, rainfall**

### I. PENDAHULUAN

Banjir merupakan salah satu bentuk fenomena alam yang terjadi akibat adanya intensitas curah hujan yang tinggi di mana terjadi kelebihan air yang tidak dapat tertampung oleh jaringan pematuan suatu wilayah. Kondisi tersebut berdampak pada timbulnya genangan di wilayah tersebut yang dapat merugikan masyarakat (Harjadi, 2007). Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar didunia yang memiliki dua musim yaitu musim panas dan musim hujan, indonesia merupakan Negara yang memiliki intensitas curah hujan yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap terjadinya masalah banjir. Peningkatan intensitas curah hujan secara dinamis dan signifikan yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh adanya peningkatan dampak dari pemanasan global yaitu berupa kenaikan suhu permukaan bumi yang disebabkan oleh aktivitas yang terjadi di permukaan bumi (Etradis Muhtama, 2023).

Banjir merupakan fenomena alam yang disebabkan oleh proses alamiah dan aktivitas manusia yang tidak

terkendali dalam mengolah alam. Proses alamiah sangat bergantung pada kondisi curah hujan, tata air tanah (geohidrologi), struktur batuan, geomorfologi dan tipypografi lahan dan aktivitas manusia terkait dengan perilaku mengeksploitasi alam untuk kesejahteraan manusia, sehingga akan cenderung merusak lingkungan (Wurin & Dr. Hendro Wardhono, 2022).

Salah satu wilayah Indonesia yang terpapar banjir adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis wilayah ini terletak dibagian tengah Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 21 Kabupaten dan 3 kota, 307 Kecamatan dan 3.047 desa dan kelurahan. Wilayah ini merupakan daerah dengan kondisi alam yang beragam sehingga menjadikan daerah ini sebagai salah satu daerah yang dapat terpapar banjir. Salah Satu desa yang terkena banjir yaitu desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

Dari data yang diperoleh dari Portal berita Tribun Toraja (Landa, 2024) didapatkan korban bencana banjir pada desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara sebanyak 2.141 warga yang menderita dan 606 rumah warga yang terendam. Banjir ini terjadi akibat di picu curah hujan yang tinggi dan adanya tanggul yang jebol serta dikaitkan dengan adanya pembangunan saluran irigasi yang belum rampung dan belum berfungsi sebagaimana mestinya. Berdasarkan pada permasalahan diatas maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Penanganan Banjir pada Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Mappedeceng Desa Kapidi Taratallu”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang akan diamati dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana evaluasi implementasi kebijakan pemerintah dalam menangani banjir di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara?
- b. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh Pemerintah dalam penanganan banjir di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi banjir di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh pemerintah dalam penanganan banjir di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

### **Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Kompleks permasalahan Evaluasi Penanganan bencana Banjir pada Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Mappedeceng Desa Kapidi Taratallu.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif digunakan yakni Kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk evaluasi implementasi dalam penanggulangan banjir di desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Menurut (Nazir, 1988) metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia atau objek, suatu kondisi suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kala peristiwa pada masa sekarang. Objek dari penelitian ini adalah evaluasi implementasi pelaksanaan penanganan banjir di desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

Obyek Penelitian bertujuan untuk mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka dari itu dilakukan penelitian dengan konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yakni Evaluasi implementasi Penanganan banjir yang dilakukan oleh pemerintah NTT yang diterapkan terhadap bencana banjir di Desa Kapidi.

Informan-informan yang peneliti libatkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Informan 1 warga desa Kapidi (Mahasiswa UIM, Muh.Afif Sulfakar)
2. Kepala Desa Kapidi (Bapak Mahmuddin)
3. Informan 2 mengenai data banjir (Dinas PUPR)

Penelitian ini dilakukan di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian di desa tersebut karena melihat fenomena alam banjir yang sering terjadi di daerah luwu utara, daerah tersebut merupakan daerah /kampung halaman peneliti yang memiliki banyak history, banjir yang datang sudah menjadi sebuah kebiasaan bisa dibilang rutin karna setiap hujan pasti banjir, namun kali ini agak parah karna saluran irigasi yang belum rampung, faktor-faktor itulah yang menggugah peneliti untuk menganalisa penanganan banjir yang dilakukan oleh pemerintah setempat terkait banjir langganan yang terjadi. Rasa penasaran bercampur sedih mengapa hal ini bisa terus berulang.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan

menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi.

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.

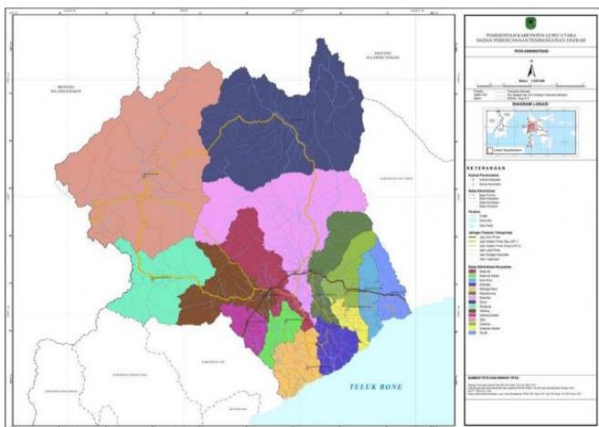
Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dapat diperoleh dengan beberapa yaitu cara observasi, dokumentasi dan wawancara.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. LETAK GEOGRAFIS

Desa Kapidi merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten Luwu Utara memiliki luas wilayah 7.502 km<sup>2</sup> dan secara geografis Kabupaten Luwu Utara terletak pada koordinat antara 2°30'45" sampai 2°37'30" Lintang Selatan dan 119°41'15" sampai 12°43'11" Bujur Timur. Sebagian besar wilayah Kabupaten luwu utara berupa wilayah pegunungan dengan gunung menjulang seperti gunung tolangi dan gunung baliase dsb. Selain gunung terdapat juga sungai besar di wilayah ini seperti sungai salu rongkong, sungai salu kula, dan sungai salu baliase. Wilayah administratif Kabupaten luwu utara berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten dan bentangan laut yang ada di sekitarnya yaitu:

1. Sebelah utara, Sulawesi tengah.
2. Sebelah timur, Kabupaten luwu timur.
3. Sebelah selatan, teluk bone dan Kabupaten luwu
4. Sebelah barat, Kabupaten toraja dan Sulawesi barat.



Salah satu wilayah di Kabupaten luwu utara adalah kecamatan Mappedeceng yang terdiri dari 15 desa yang salah satunya adalah desa Kapidi. Dari peta geografis

wilayah kecamatan mappedeceng dapat dilihat bahwa desa kapidi secara geografis terletak diantara desa tarra tallu dan desa ujung mattajang (Utara, n.d.).

#### B. IKLIM DAN TOPOGRAFI DESA KAPIDI

Pada umumnya iklim di Indonesia mengalami dua musim yaitu kemarau dan hujan. Bulan juli-september angin yang bertiup dari Australia tidak membawa uap air yang cukup bayak sehingga terjadi musim kemarau. Sedangkan bulan desember-maret angin bertiup dari Samudra hindia dan Samudra pasifik membawa uap air yang cukup banyak sehingga terjadinya musim hujan. Keadaan ini terjadi setiap 6 bulan dimana masa peralihan dari bulan April-mei dan oktober-november. Maka dari itu wilayah Kabupaten luwu utara mengalami musim kekeringan tertinggi pada bulan September-oktober sedangkan untuk musim hujan tertingginya terjadi pada bulan maret-april.

Kabupaten Luwu Utara pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 wilayah berdasarkan tipografinya yaitu wilayah dataran rendah sebanyak 9 kecamatan dengan ketinggian 15-70 mdpl dan dataran tinggi sebanyak 3 kecamatan dengan ketinggian >1000 mdpl. Kecamatan Mappedeceng termasuk di 9 kecamatan dataran rendah tersebut.

#### C. DESKRIPSI PENANGANAN BANJIR

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti memperoleh data dengan informan atau narasumber yang meliputi warga desa (mahasiswa UIM), Kepala Desa Kapidi (Bapak Mahmudin) dan dinas PUPR. Penanganan yang dilakukan pemerintahan dalam menangani banjir di desa kapidi memiliki tahapan; pra bencana, tahapan tanggapan darurat, tahapan pemulihan pasca bencana.

##### 1. Penanganan pada Tahapan pra Bencana

Tahapan pra bencana merupakan tahapan penanganan yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya bencana. Untuk memperoleh informasi peneliti melakukan wawancara kepada informan yaitu warga dengan mengajukan pertanyaan. "Apa saja dan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum terjadinya bencana?". Berdasarkan pertanyaan tersebut informan menjawab "Penanganan yang dilakukan selama ini hanya melakukan pencegahan secara fisik terhadap lingkungan dengan melaksanakan beberapa program yang telah disepakati bersama masyarakat program-program tersebut antara lain: pembangunan selokan-selokan di seputaran desa, dan perbaikan beberapa tanggul besar".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penanganan tahapan pra bencana yang dilakukan oleh pemerintah belum efektif, oleh karena itu pemerintah baik dari desa sampai pemerintah pusat harus bekerja sama dalam penanganan pra bencana misalnya adanya penyusunan data tentang resiko terjadinya bencana.

#### 2. Tahapan Penanganan pada saat Bencana

Penanganan ini dilakukan pada saat bencana terjadi, pada tahap ini hal yang dilakukan adalah penyelamatan korban jiwa. Pada tahap ini juga menentukan status keadaan bencana yang terjadi. Maka untuk memperoleh informasi tentang penanganan tahapan tanggap darurat pada saat terjadi banjir di Desa Kapidi peneliti mewawancarai beberapa informan. Peneliti mengajukan pertanyaan “Apa saja usaha atau tindakan yang dilakukan pemerintah desa pada saat penanganan tahapan tanggap darurat banjir di desa Kapidi?”. Berdasarkan pertanyaan tersebut informan menjawab “Penanganan yang dilakukan pemerintah pada saat terjadinya bencana sudah memuaskan dimana yang berperan dalam membantu agar korban cepat terevakuasi tidak hanya pemerintah saja melainkan pihak swasta juga, penanganan seperti tempat pengusian pada hari pertama itu kurang memuaskan tetapi setelah adanya bantuan dari berbagai pihak tempat pengusian lebih diperhatikan”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penanganan yang dilakukan pemerintah dalam menangani bencana pada saat tanggap darurat belum efektif hal ini dibuktikan dengan jawaban yang diberikan oleh narasumber.

#### 3. Tahapan Pemulihan

Kegiatan ini dilakukan setelah bencana terjadi, pada tahap ini yang biasa dilakukan adalah rehabilitas dan rekontruksi. Rehabilitas adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau pelayanan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk berjalannya secara wajar semua aspek pemerintah dan kehidupan pada wilayah pascabencana. Rekontruksi adalah pembangunan kembali sarana, prasarana dan kelembagaan pada wilayah pascabencana baik dari tingkat pemerintah maupun masyarakat. Tahap pemulihan lebih tertuju pada pembangunan kembali baik dari segi ekonomi, sosial, budaya serta bangkitnya peran masyarakat dari segala aspek kehidupan pada wilayah pasca bencana.

### **D. EVALUASI PENANGANAN BENCANA BANJIR DI DESA KAPIDI**

Pendekatan penanganan banjir di desa Kapidi peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh William Dunn dalam (Siregar & Ginting, 2023) yang meliputi efektif, efisiensi, kecukupan, pemerataan, keadilan dan responsivitas.

#### 1. Efektifitas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Mappedeceng sudah efektif karena dalam proses sosialisasi kepada masyarakat desa Kapidi tentang penanganan banjir dan Tetapi dari komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dinilai oleh masyarakat kurang efektif karena tidak melibatkan semua masyarakat, sehingga masyarakat menilai adanya rapat tertutup.

#### 2. Efisiensi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti untuk kebijakan implementasi dimana usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani pasca bencana di desa Kapidi sudah dipandang memuaskan masyarakat Kapidi. Hal ini dibuktikan dengan adanya bantuan berupa anggaran-anggaran untuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang ada di desa Kapidi dan bantuan-bantuan lain seperti obat, baju-baju, makanan dan minuman.

#### 3. Kecukupan

Dari hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dengan cara mewawancarai beberapa masyarakat dalam penanganan yang dilakukan oleh pemerintah baik itu dari pusat maupun dari pemerintah desa Kapidi sudah dipandang bahwa penanganan yang dilakukan pemerintah sudah dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kepuasan masyarakat dalam hal bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah.

#### 4. Pemerataan

Hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dengan cara mewawancarai narasumber tentang bagaimana pemerataan dana dan bantuan berupa sarana dan prasarana yang berikan oleh pemerintah pusat, dana yang diberikan oleh pemerintah pusat sudah di gunakan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan misalnya pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang digunakan untuk keperluan masyarakat.

#### 5. Ketepatan

Hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dengan cara mewawancarai masyarakat Kapidi tentang penanganan banjir. Ketepatan dalam hal ini lebih menekan penanganan pemerintah dalam

menyalurkan bantuan kepada masyarakat Kapidi sudah tepat. Hal ini dibuktikan dengan adilnya pembagian ganti rugi pembangunan rumah-rumah masyarakat oleh pemerintah pusat melalui pemerintah desa.

#### 6. Resposivitas

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan mewawancarai masyarakat desa Kapidi. penanganan banjir yang dilakukan oleh pihak pemerintah dengan cara bersosialisasi dapat diterima oleh masyarakat desa Kapidi

### **E. IMPLEMENTASI PENANGANAN BANJIR DI DESA KAPIDI**

Pendekatan kebijakan implementasi penanganan banjir di Desa Kapidi peneliti menggunakan teori Geogre Edward III dalam (Siregar & Ginting, 2023) yang meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan birokrasi.

#### 1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan banjir di desa Kapidi agar dapat tercapai. Langkah awal yang dilakukan dalam penanganan banjir pasca bencana di desa Kapidi bersosialisasi secara umum kepada masyarakat Kapidi yang secara langsung disampaikan oleh kepala dinas BPBD setempat yang dibantu oleh beberapa petugasnya tentang penyebab banjir secara kondisi alam, curah hujan dan kelalaian dari manusia, dan cara penanggulangannya agar bencana di desa Kapidi dapat dicegah disosialisasikan tentang tidak menebang pohon sembarangan sehingga tidak menyebabkan gundulnya hutan didaerah penguungan sehingga pada saat musim hujan tidak ada pohon yang menyerap. Langkah berikutnya dari program desa Kapidi sendiri adalah bersosialisasi secara internal, dimana sosialisasi tersebut hanya melibatkan tokoh-tokoh adat desa Kapidi dan beberapa masyarakat penting didalam desa Kapidi, Sosialisasi ini bertujuan untuk menggali informasi dari tokoh-tokoh adat penyebab banjir di desa Kapidi.

#### 2. Sumber daya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sumber daya yang dilakukan ataupun yang diberikan kepada masyarakat dalam hal ini pemerintah desa Kapidi tidak berdiri sendiri melainkan semua struktur pemerintah baik dari pusat, provinsi, daerah dan desa semua berperan. Sumber daya yang diberikan pemerintah baik dari pusat

maupun daerah meliputi sumber daya, anggaran dan sarana dan prasarana.

Sumber daya manusia dalam hal ini masyarakat desa Kapidi bersama bantuan sumber daya manusia dari pemerintah antara lain petugas BPBD setempat. Anggaran diberikan kepada semua masyarakat yang menjadi korban banjir di desa Kapidi, Anggaran diberikan kepada pemerintah desa bertujuan untuk membangun kembali fasilitas-fasilitas desa yang terkena dampak dari banjir. Sarana dan prasarana dalam penanganan banjir pemerintah sudah menyiapkan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat pasca bencana penanganan yang dilakukan adalah menyiapkan pengusian yang aman kepada masyarakat Kapidi, bantuan obat-obat makanan dan minuman, baju-baju dan bantuan-bantuan lain seperti alat-alat berat yang digunakan untuk mempermudah proses pencarian korban.

#### 3. Disposisi

Berdasarkan yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti, untuk desa Kapidi belum adanya stuktur organisasi desa yang ditugaskan secara khusus dalam penanganan banjir. Tetapi dengan adanya lembaga bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana dan bantuan lembaga pemerintah lainnya. Secara disposisi penanganan pasca bencana yang terjadi di desa Kapidi sangat baik karena penanganan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan apa yang diharapkan dimana dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.

Semua pihak yang membantu tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, dan tidak hanya memiliki kemampuan untuk penanganan pasca banjir di Desa Kapidi tetapi juga pemerintah tidak mementingkan kepentingan pribadi melainkan kepentingan bersama atau adanya dorongan untuk membantu sesama.

#### 4. Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dalam penanganan banjir di desa Kapidi yang dilakukan oleh lembaga pelaksanaan yang membantu penanganan banjir dari pemerintah secara keseluruhan sudah optimal, meskipun bantuan sumber daya manusia dan sarana prasarana pada saat itu cukup lamban Penanggulangan Bencana dan bantuan lembaga pemerintah lainnya. Secara disposisi penanganan pasca bencana yang terjadi di desa Kapidi sangat baik karena penanganan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan apa yang

diharapkan dimana dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dimana semua pihak yang membantu tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, dan tidak hanya memiliki kemampuan untuk penanganan pasca banjir di Desa Kapidi tetapi juga pemerintah tidak mementingkan kepentingan pribadi melainkan kepentingan bersama atau adanya dorongan untuk membantu sesama.

### 5. Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dalam penanganan banjir di desa Kapidi yang dilakukan oleh lembaga pelaksanaan yang membantu penanganan banjir dari pemerintah secara keseluruhan sudah optimal, meskipun bantuan sumber daya manusia dan sarana prasarana pada saat itu cukup lamban dikarenakan pada saat pasca bencana daerah desa Kapidi dan desa tetangga lainnya di landa hujan yang cukup deras, dan jalan raya/jembatan semuanya terputis sehingga pada saat itu pemerintah juga kewalahan dalam penanganannya. dikarenakan pada saat pasca bencana daerah desa Kapidi dan desa tetangga lainnya di landa hujan yang cukup deras, dan jalan raya/jembatan semuanya terputis sehingga pada saat itu pemerintah juga kewalahan dalam penanganannya.

**Tabel 1**

Analisis Penanganan Evaluasi nan Banjir Desa Kapidi

Implementasi Evaluasi	Komunikasi	Sumberdaya	Disposisi	Birokrasi
Efektivitas	Komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam penanganan banjir desa Kapidi sudah anggaran dianggap sudah efektif, meskipun penyampaian informasi belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat Lamaneala	Sumberdaya yang diberikan pemerintah dalam penanganan banjir desa Kapidi yang meliputi anggaran, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia yang turut dilibatkan dalam penanganan banjir desa Kapidi, efektifnya sumberdaya yang diberikan pemerintah dinilai sudah efektif meskipun untuk sarana penanganan misalnya alat-alat berat belum memadai	Disposisi yang melibatkan implementor-implementor dari Pemerintah yang sudah sangat efektif dalam hal dibuktikan dengan adanya tanggungjawab penuh serta keterlibatan masyarakat dalam penanganan banjir desa Kapidi contohnya pengevakuasian korban, penyapan tempat pengungsian.	Birokrasi yang dilakukan dalam penanganan banjir desa Kapidi sudah efektif, karena dalam penanganan elah melibatkan seluruh pihak baik dari pemerintah maupun swasta sehingga masyarakat Kapidi merasa sangat puas.
Efisiensi	Usaha yang dilakukan pemerintah dalam penyampaian informasi tentang penyebab banjir, dengan cara mensosialisasikan tentang penyebab banjir meskipun belum sepenuhnya dipahami dan belum dipercaya karena adanya kepercayaan penyebab banjir akibat ulah masyarakat yang mencuri air dari gunung.	Sumberdaya efisiensi yang dilakukan pemerintah dalam penanganan banjir dengan adanya berbagai usaha atau upaya dalam penanganannya contoh penanganan evakuasi korban yang dan pemberian anggaran-anggaran untuk pembangunan kembali desa Kapidi	Efisiensi disposisi yang dilakukan pemerintah dalam penanganan banjir desa Kapidi sudah memuaskan hal ini dibuktikan dengan upaya-upaya yang dilakukan sangat tulus sehingga kepedulian dirasakan oleh masyarakat Kapidi	Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang sudah memuaskan karena adanya tanggungjawab yang penuh dari implementor- implementor dari pemerintah.

Kecukupan	Kecukupan komunikasi dari pemerintah sebelum terjadinya bencana belum cukup karena penyampaian tentang sosialisasi sebelum bencana belum pernah dilakukan.	Kecukupan sumberdaya dinilai sangat memuaskan karena dengan adanya sumberdaya yang diberikan pemerintah penanganan banjir desa Kapidi dapat tercapai.	Kecukupan disposisi yang dikaukan pemerintah untuk penanganan desa kapidi sudah memuaskan karena keterlibatan pemerintah.	Kecukupan birokrasi dalam penanganan banjir desa Kapidi sudah dianggap cukup karena adanya keterlibatan dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa
Ketepatan	Komunikasi yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya tepat karena penyampaian/ sosialisasi tentang penanganan banjir.	Ketepatan sumberdaya yang diberikan pemerintah sudah tepat karena adanya kepuasan masyarakat Kapidi	Ketepatan disposisi dengan cara pemerintah mengangakat personel-personil dalam penanganan adanya kehadiran personel tersebut dalam penanganan.	Keterlibatan pemerintah dari pusat sampai desa sangat memuaskan masyarakat Kapidi
Pemerataan	Untuk komunikasi pemerataan setelah bencana dinilai sangat memuaskan karena pemerintah mensosialisasikan serta memberi perigata dimi bila terjadinya bencana susualan.	Pemberian atau pendistribusian sumberdaya yang diberikan oleh pemerintah sudah rata, salah satunya pembagian makanan dan minuman serta bantuan anggaran lainnya.	Dengan adanya pemerataan pengangkatapersonil sehingga adanya bantuan penanganan banjir desa Kapidi dilakukasecara cepat.	Pemerataan tugas yang diberikan kepada lembaga-lembaga yang membantu sehingga adanya tanggung jawab yang berbeda setiap lembaga sehingga proses penanganan dilaksanakan secara cepat dan dirasakan oleh masyarakat Kapidi
Responsivitas	Komunikasi yang dilakukan pemerintah dengan cara sosialisasi belum sepenuhnya	Respon yang diberikan pemerintah dalam penanganan banjir desa Kapidi sudah dianggap baik karena bantuan-bantuan yang datang sangat cepat.	Bantuan yang dilakukandari setiap individu atau Personal dari pemerintah sangat bertanggungjawab.	Penanganan yang dilakukan pemerintah Sudah memuaskan karena penanganan yang dilakukan secara cepat.

## F. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENANGANAN BANJIR DESA KAPIDI

### Faktor-faktor pendorong

Faktor-faktor pendorong dalam menangani banjir di Desa Kapidi adalah sebagai berikut:

1. Faktor sosial, budaya dan ekonomi, tingkat masyarakat dalam perkembangan ekonomi dan sosial mempengaruhi penanganan banjir. Faktor pendorong sosial, budaya dan ekonomi dalam penanganan banjir desa Kapidi adalah sebagai berikut:
  - a. Peran masyarakat Kapidi yang sangat tinggi dalam penanganan banjir misalnya pembuatan selokan dan tanggul tanggul, penanganan saat terjadinya banjir dimana masyarakat yang masih kuat dan tertolong membantu pihak pemerintah dalam proses pencarian korban.
  - b. Peran pemerintah baik dari pusat sampai pada pemerintah desa dimana pemerintah menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan masyarakat Kapidi. Sehingga adanya kepuasan dari masyarakat bagaimana peran pemerintah.

### 2. Faktor politik

Kondisi politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima tau dapat bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat, faktor politik yang dapat mendorong penanganan banjir desa Kapidi direspon dan ditangani langsung oleh kota

kecamatan Mappedeceng, sehingga penanganan bencana khususnya pada evakuasi korban dapat bantuan yang datang dari berbagai kalangan dan bahkan dari seluruh Indonesia.

**Faktor-faktor penghambat**

Faktor-faktor penghambat dalam penanganan banjir di desa Kapidi adalah sebagai berikut:

1. Faktor sosial, budaya dan ekonomi faktor penghambat dari faktor sosial, budaya dan ekonomi dalam penanganan banjir di desa Kapidi adalah sebagai berikut:
  - a. Komunikasi yang dinilai kurang dalam mensosialisasikan tentang penanganan sebelum bencana, sehingga pada saat terjadinya bencana masyarakat tidak dapat mengurangi dampak bencana.
  - b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai
2. Faktor politik, faktor penghambat banjir desa Kapidi adalah sebagai berikut:
  - a. Belum memiliki Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), Standart Operasi Prosedur (SOP) dan peraturan yang secara khusus mengatur tentang penanggulangan bencana di daerah sehingga menyebabkan ketrgantung dalam penanganan karena harus menunggu penaganan dari kota FLOTIM sendiri.
  - b. Susah untuk menentukan status bencana yang terjadi karena belum adanya BPBD sendiri di kecamatan.
  - c. Penangan yang dilakukan sebelum oleh desa Kapidi sendiri masih belum dipahami oleh masyarakat sendiri karena belum adanya pihak dari kecamatan untuk mesosialisasikan terlebih dahulu.

**Tabel 2**  
Penanganan Banjir Desa Kapidi

Aspek Penanganan Banjir Kapidi	Bentuk Penanganan
Sebelum (Program pemerintah desa Kapidi)	Upaya-upaya yang sudah dilakukan dari pemerintah desaKapidi dalam pencegahan banjir: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembuatan selokan- selokan diseputaran desa</li> <li>● Perbaiki beberapa tanggul besar .</li> </ul>
Saat	Upaya yang dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyelamatan dan evakuasi korban yang dilakukan oleh masyarakat Kapidi dan masyarakat desa tetangga</li> <li>● Penyelamatan harta benda yang masih tersisa</li> <li>● Pengurusan pengusian</li> <li>● Memberitahu kepada pemerintah kecamatan tentang telah terjadinya bencana</li> <li>● Peringat Informasi adanya banjir susulan dari BPBD FLOTIM</li> <li>● Ketersedian sarana dan prasarana dari berbagai sumber bantuan baik dari pemerintah maupun swasta</li> </ul>
Sesudah	Upaya yang dilakaukn setelah bencana terjadi: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Langkah awal yang dilakukan adalah pemulihanterhadap budaya dan adat desa Kapidi</li> <li>● Pemulihan rehabilitasi perbaikan pelayanan umum masyarakat Kapidi dari kantor desa, sekolah dasar, dan puskesmas.</li> <li>● Pemulihan Rekontruksi pembangunan kembali saran dan prasarana misalnya membangun kembali</li> </ul>

**V. KESIMPULAN**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan tujuan dari peneliti yang telah dipaparkan sebelumnya ditarik kesimpulan Evaluasi dari implementasi yang dilakukan pemerintah desa Kapidi dalam Penanganan Banjir.

1. Efektivitas dan efesiensi oleh pemerintah desa Kapidi dinilai masih cukup baik, walaupun dalam penyampaian komunikasi yang dilakukan pemerintah baik dari Desa maupun pemerintah Daerah tidak semuanya dipahami oleh masyarakat Kapidi, sumberdaya yang diberikan untuk

membantu penanganan dinilai cukup memadai dari sumberdaya anggaran dana untuk membantu kerugian masyarakat Kapidi yang diolah oleh pemerintah desa, dan untuk sarana dan prasarana meskipun untuk alat-alat berat untuk membantu pencarian korban tidak memadai. Hal ini menunjukkan berbagai usaha dari implemementasi yang dilakukan telah cukup sebanding dengan hasil yang diterima oleh masyarakat.

2. Ketepatan dalam menjawab masalah dalam Implementasi penanganan bencana banjir desa Kapidi dinilai cukup bagus, karena dengan adanya disposisi pengangkat personil yang tepat dapat membantu penanganan dengan tepat sehingga dirasakan oleh masyarakat Kapidi, tetapi untuk birokrasi yang dilakukan pemerintah dinilai belum tepat, hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya penanggungjawab untuk desa belum memadai sehingga penanganannya belum secara optimal.
3. Pemerataan dan kecukupan dari implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan bencana banjir desa Kapidi, sumberdaya yang diberikan pemerintah sudah cukup merata, dan untuk kepuasan terhadap sumberdaya yang diberikan.
4. Responsivitas dari implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan bencana banjir desa Kapidi, dinilai sudah bagus hal ini dibuktikan dengan adanya respon dari berbagai pihak sehingga waktu penanganannya cepat dan tepat.

## B. Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti agar penanganan banjir dapat mencapai tujuan adalah:

1. Adanya peningkatan kerjasama/ komunikasi antara kota FLOTIM dan kecamatan dan dari kecamatan baru disosialisasikan kepada desa-desa sehingga penanganan sebelum terjadinya bencana dapat mengurangi dampak resiko banjir, adanya birokrasi yang dilakukan pemerintah FLOTIM harus lebih optimal sehingga dalam penanganan banjir untuk desa- desa yang mungkin diprediksi akan terjadi banjir ataupun bencana lainnya yang dapat terjadi ada penanggungjawabnya. Sumber daya manusia yang meliputi pengangkat personil sehingga adanya rasa tanggungjawab yang lebih tinggi dalam penanganan bencana.

2. Kepercayaan masyarakat yang terlalu tinggi terhadap kebudayaan misalnya kebudayaan mempercayai air belerang tidak boleh dibawah kemana-mana sebaiknya di kurangkan, karena dilihat dari kondisi wilayah desa Kapidi dapat ditemukan hasil penyebab banjir karena curah hujan dan kondisi wilayah.

## REFERENSI

- Etradis Muhtama, dkk. (2023). Pelaksanaan Modal Sosial Dalam Penanggulangan Bencana Banjir (Studi di Desa Rante Gola Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara). *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 10(1). <https://doi.org/10.48175/ijarsct-13062>
- Harjadi, dkk. (2007). *Pengenalan karakteristik bencana dan upaya mitigasinya di Indonesia*. BAKORNAS PB.
- Landa, A. (2024). <https://toraja.tribunnews.com/2024/04/25/2-174-rumah-di-11-desa-di-mappedeceng-luwu-utara-terendam-banjir>. *Tribun Toraja.Com*.
- Nazir. (1988). *Metode Penelitian*.
- Siregar, T. A., & Ginting, S. (2023). Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Pra Bencana Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 5(2), 137–146. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i2.618>
- Utara, P. resmi K. L. (n.d.). *peta geografis luwu utara*. <https://portal.luwuutarakab.go.id/blog/page/letak-geografis>
- Wurin, K. M., & Dr. Hendro Wardhono, M. S. (2022). Evaluasi Implementasi Penanganan bencana Banjir Di Desa Lamanela Kecamatan Ilebolenng Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 26.